BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi sebagai akibat adanya krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan Juli 1997, berakibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan berskala besar tetapi disisi lain masih banyak usaha kecil dan menengah yang masih bertahan (Sakur, 2011). Bahkan bisa dikatakan industri kecil ini mempunyai peran dalam menyelamatkan perekonomian nasional, industri kecil cenderung menggunakan bahan baku lokal dan bahan impor yang kecil proporsinya (Sakur, 2011). Produksinya tidak terlalu dipengaruhi depresiasi nilai rupiah, sehingga lebih tahan terhadap goncangan perekonomian global, meskipun sangat dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat (Sakur, 2011). Pada tahun 2006 total populasi Usaha Kecil Menengah (UKM) lebih dari 42 juta dan memberikan sumbangan dalam *output* nasional (PDRB) mencapai 56,7% dan dalam ekspor non-migas 15%, serta mempunyai andil 99,6% dalam penyerapan tenaga kerja (Sakur, 2011).

Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kedudukannya pada saat ini dalam dunia usaha, keberadaan UKM dalam perekonomian Indonesia cukup dominan dan signifikan (Asnur, 2008). Sedikitnya, terdapat 3 indikator yang menunjukkan bahwa UKM di Indonesia dominan dan penting (Renaldo Martin Novianto Hutagaol, 2012). Pertama, jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi,

jumlah populasi UKM pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99% terhadap total usaha di Indonesia, dengan jumlah tenaga kerja mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia (Renaldo Martin Novianto Hutagaol, 2012). Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, sektor UKM menyerap 79,4 juta jiwa atau sekitar 99,4% dari total angkatan kerja yang bekerja (Renaldo Martin Novianto Hutagaol, 2012). Ketiga, kontribusi UKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) cukup signifikan yakni jumlah PDB mencapai Rp 3.957,4 triliun, dimana UKM memberikan kontribusi sebesar Rp 2.121,3 triliun atau 53,6% dari total PDB Indonesia (Renaldo Martin Novianto Hutagaol, 2012). Hal ini berarti jumlah UKM di Indonesia lebih besar dari pada perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia, karena UKM memiliki kelebihan yang tidak dimiliki perusahaan, yaitu produk yang dimiliki adalah produk lokal dan daya serap tenaga kerja yang tinggi (Renaldo Martin Novianto Hutagaol, 2012).

Pada tahun 2013, jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia mencapai 56,6 juta, dari jumlah tersebut 99,8% merupakan UMKM yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total tenaga kerja yang ada saat ini di Indonesia, usaha kecil seperti koperasi dan UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yaitu sebesar 56% (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015). Dengan kata lain, UMKM dapat disebut sebagai tulang punggung perekonomian negara (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015).

Di banyak negara, UKM juga memberikan kontribusi yang sama besarnya seperti yang terdapat di Indonesia, tercatat jumlah UKM di negara maju rata-rata mencapai 90% dari total seluruh unit usaha, dan menyerap 2/3 tenaga kerja dari jumlah pengangguran yang ada (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012). Afrika Selatan merupakan salah satu negara dengan 95% sektor usahanya merupakan UMKM, sektor ini setiap tahunnya rata-rata memberikan kontribusi sebesar 35% terhadap produk domestik bruto, serta mampu mengurangi sebanyak 50% tingkat pengangguran di negara tersebut (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012).

Potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012). Padahal pada tahun 2015, Indonesia menghadapi *Asean Economic Community* (AEC), dimana persaingan pasar akan semakin tinggi bagi pelaku UMKM (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015). Jika UMKM tidak melakukan inovasi dan pengembangan usahanya, maka bisa jadi banyak pelaku UMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya UMKM (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015), Untuk pengembangan tentu saja membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Sebagian besar UMKM hanya menggunakan dana (modal) pribadi dalam menjalankan usahanya dan tidak ada pemisahan antara uang pribadi dengan uang perusahaan, padahal untuk mengembangkan sebuah usaha menjadi lebih baik dibutuhkan dana yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi dengan dana perusahaan (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015). Oleh sebab itu, tidak hanya modal pribadi saja yang dibutuhkan tetapi juga

dana yang berasal dari pinjaman pada pihak ketiga seperti bank, KUR atau sejenisnya (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015). Namun, fenomena yang ada, banyak UMKM saat ini yang hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usaha mereka, meskipun saat ini telah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa di dapatkan pada beberapa bank tertentu (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015). Alasan UMKM tidak menggunakan dana atau modal dari pemberi kredit yaitu skala usaha yang masih kecil dan lama usaha yang masih baru (1-3 tahun), alasan lainnya yaitu rumitnya persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit, salah satu syaratnya yaitu laporan keuangan UMKM yang mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015). Akan tetapi, banyak UMKM yang tidak menyediakan atau menyusun laporan keuangan dalam usahanya, penyebabnya yaitu UMKM yang terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya, sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Rias Tuti & S, Patricia Febrina Dwijayanti, 2015).

Sebenarnya terdapat program pembiayaan UMKM yang dijalankan oleh pemerintah, salah satu program tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2009 ditargetkan sekitar Rp 20 triliun, tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala akses terhadap perbankan untuk mendapatkan pembiayaaan (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012).

Namun realisasi KUR tersebut jauh dari target Rp 20 triliun yakni hanya sebesar Rp 14,8 triliun (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012).

Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi UMKM (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012). Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya, dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, seperti pembuatan laporan keuangan (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012). Namun pelaksanaan pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi UMKM karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012). Berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi UMKM adalah latar belakang pendidikan yang tidak paham akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012).

Modal kerja menjadi masalah pokok bagi pengembangan usaha kecil dan menengah, sebab sampai sekarang mereka kesulitan mendapat pinjaman karena aturan-aturan pada lembaga keuangan bank terlalu memberi persyaratan *strict*/kaku (Alimarwan Hanan, 2003).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai mayoritas usaha kecil menengah (UKM) di daerah hingga saat ini belum *bankable* sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan, sebagian besar pelaku UKM dinilai masih belum bankable, sehingga terkendala dalam akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha (Rosan P. Roeslani, 2014)

Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura mengatakan permasalahan itu dipicu atas keterbatasan UKM dalam mengelola keuangannya sehingga menjadikannya tidak *bankable*, pengelolaan UKM harus diperkuat mulai dari pengelolaan keuangannya mulai dari kemampuan UKM menyusun laporan dan neraca keuangan (Safari Azis, 2013) .

Hal ini juga terjadi di UKM yang berada di Kota Cimahi, seperti yang diungkapkan oleh bapak Wiweko, salah satu personel di seksi UMKM DISKOPINDAGTAN (Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan Pertanian) Kota Cimahi bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM Kota Cimahi masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari tidak sesuainya bukti transaksi dengan pencatatan yang ada dikarenakan bercampurnya harta pribadi dengan harta perusahaan (Widodo, 2015). Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pengelolaan perusahaan oleh manajemen kepada pihak eksternal maupun internal, melihat pentingnya dari segi kegunaan, laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku agar dapat diinterpretasikan dengan konsep dan pemahaman yang sama oleh para penggunanya (Ade Astalia Pratiwi, Jullie J. Sondakh, Lintje Kalangi, 2014). Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, mereka membutuhkan tenaga ahli dibidang akuntansi sehingga

dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar namun keterbatasan pengetahuan dan tenaga ahli menjadi kendala selama ini (Widodo, 2015). Padahal bagi kreditor, *banker* atau *supplier* laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang (Sofyan Syafri Harahap, 2009:8).

Banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk mewujudkan tujuan dan harapan demi memenangkan persaingan bisnis, Salah satunya adalah dengan meningkatkan sistem pengendalian internal yang ada pada perusahaan agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan (Nur Fakhrur Razy, 2012). Penanggung jawab dalam penetapan dan melakukan pengendalian *intern* suatu entitas adalah manajemen, karena manajemenlah yang konsisten bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2010:240).

Namun pengendalian internal yang baik diperoleh dari suatu struktur yang terkoordinasi yang berguna bagi pimpinan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih teliti, mencegah kecurangan dalam perusahaan, serta mengamankan harta perusahaan (Munawaroh, 2011).

Lemahnya pengendalian merupakan motivasi awal munculnya penyelewengan, misalnya kesalahan, kolusi, penyimpangan manajemen serta manfaat dan biayanya bagi organisasi (Azhar Susanto, 2008:94). Untuk mengurangi peluang terjadinya *error dan fraud,* struktur organisasi suatu perusahaan harus memisahkan tugas dengan pantas, walaupun hal tersebut tidak menjadi operasi efisien dan komunikasi yang efektif (Siti Kurnia Rahayu & Ely

Suhayati, 2010:230). Namun fenomena yang terjadi menyebutkan bahwa sebagian besar usaha kecil dan menengah tidak melakukan pemisahan tugas sesuai dengan porsinya, banyak otorisasi tanggung jawab beberapa pekerjaan dilakukan oleh satu orang saja yaitu oleh pemilik perusahaan, hal tersebut membuat pengendalian didalam usaha tersebut menjadi lemah (Widodo, 2015). Padahal manajemen dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan harus menunjukan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dan pada orang lain (Azhar Susanto, 2008: 102).

Mencapai keamanan dan pengendalian yang memadai atas sumber daya informasi yang memadai atas sumber daya informasi suatu organisasi seharusnya merupakan suatu prioritas merupakan prioritas utama manajemen puncak, walaupun tujuan pengendalian internal tetap sama apapun metode pemprosesan datanya, SIA yang berdasarkan komputer membutuhkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang berbeda (Marshall B. Romney & Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk, 2011:228). Untungnya, komputer juga memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan pengendalian internalnya, membantu manajemen dalam mengendaliakan organisasi bisnisnya merupakan tujuan utama SIA (Marshall B. Romney & Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk, 2011:228).

Sebagian dari UMKM telah menggunakan komputer dalam kegiatan usahanya namun pengggunakan komputer tersebut belum maksimal karena kurangnya pengetahuan para pengguna *(user)* dalam menggunakan *software* yang

ada sehingga membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi terhambat (Widodo, 2015).

Padahal Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012). Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang: 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012). SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012). Selain adanya SAK ETAP tersebut, kemudahan lain bagi UMKM dalam hal pembukuan akuntansi adalah semakin banyaknya *software* akuntansi yang dapat digunakan UMKM, kedepannya diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan sehingga lebih mudah bagi para pengusaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan (Rizki Rudianto & Sylvia Veronica Siregar, 2012).

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas (SAK ETAP, 2009:14). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan

laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (SAK ETAP, 2009:2). kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna (SAK ETAP, 2009:2). Untuk maksud itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketentuan yang wajar (SAK ETAP, 2009:2).

Semakin baik kualitas informasi dimiliki oleh suatu organisasi maka akan semakin baik pulalah komunikasi yang terjadi didalamnya, dengan membaiknya kualitas komunikasi dalam suatu organisasi maka semakin baik pula integritas organisasi tersebut (Azhar Susanto, 2008:11).

Selain semakin terintegrasi atau solidnya suatu organisasi, informasi berkualitas akan meningkatkan pula kualitas pemahaman para pengelola organisasi tersebut dalam melihat perubahan-perubahan yang terjadi baik didalam maupun diluar organisasi (Azhar Susanto, 2008:11). Semua informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi saat ini juga harus mendukung peningkatan produktifitas, efisiensi dan pengendalian yang merupakan hal penting dalam menghadapi persaingan (Azhar Susanto, 2008:11).

Alasan perusahaan menyusun pengendalian internal adalah dalam rangka membantu dalam mencapai tujuannya (Munawaroh, 2011). Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat

mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan (Munawaroh, 2011).

Pengendalian internal dirancang dengan memperhatikan kepentingan manajemen perusahaan dalam menyelenggarakan operasi perusahaannya dan juga memperhatikan aspek biaya yang harus dikeluarkan, serta manfaat yang diharapkan *(*Munawaroh, 2011). Dalam pengendalian internal seharusnya terdapat aktivitas pengendalian yang didalamnya memuat fungsi pemisahan tugas yang salah satunya adalah pemisahan dalam mengotorisasi transaksi (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, 2010:230). Pengendalian internal tidak dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyelewengan sama sekali, tetapi pengendalian internal yang memadai akan dapat menekan atau memperkecil terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam batas yang layak dan kalaupun terjadi kesalahan atau penyelewengan dapat segera diketahui dan diatasi, namun Pengendalian internal yang bagaimanapun baiknya, tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut (Munawaroh, 2011).

Hal-hal yang perlu diketahui bahwa penerapan pengendalian *intern* dalam suatu perusahaan tergantung pada situasi dan jenis perusahaan sehingga berbeda satu sama lain, Jika tidak memenuhi unsur-unsurnya maka pengendalian *intern*

akan lemah (Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini, 2011). Sebagai akibat dari masalah-masalah tersebut, pengendalian keamanan dan integritas sistem menjadi isu yang penting (Marshall B. Romney & Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk, 2011:225).

Masalah pengendalian komputer sering kali diremehkan dan dianggap minor, banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa keamanan data adalah hal yang penting untuk kelangsungan hidup perusahaan mereka (Marshall B. Romney & Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk, 2011:227). Untungnya, komputer juga memberikan kesempatan bagi organisasi untuk meningkatkan pengendalian internal, membantu manajemen dalam mengendalikan organisasi bisnisnya adalah tujuan utama Sistem Informasi Akuntansi/SIA (Marshall B. Romney & Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk, 2011:228)

Suatu sistem informasi akuntansi yang baik harus mempunyai suatu penendalian (Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini, 2011:222). Pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan/kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan (Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini, 2011:222).

Sebuah sistem informasi akuntansi (SIA) yang efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun (Marshall B. Romney & Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk, 2011:3). Tanpa perangkat untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi, tidak akan ada cara untuk memutuskan seberapa baik kinerja perusahaan (Marshall B. Romney &

Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk, 2011:3). Setiap organisasi juga perlu menelusuri pengaruh-pengaruh berbagai aktifitas atas sumber daya yang ada di bawah pengawasannya, informasi tentang para pelaku yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tersebut penting untuk menetapkan tanggung jawab dari tindakan yang diambil (Marshall B. Romney & Paul John Steinbart yang diterjemahkan oleh Deny Arnos Kwary dkk, 2011:3).

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan topik dan pengembangan judul **"Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Internal dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan ".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1) Laporan keuangan UMKM di Cimahi belum memiliki kualitas yang baik, hal ini dapat dilihat dari tidak sesuainya bukti transaksi dengan pencatatan yang ada dikarenakan bercampurnya harta pribadi dengan harta perusahaan.
2) Pelaksanaan pengendalian internal pada UMKM di Cimahi terkait sumber daya manusia masih minim karena pengendalian yang dilakukan selama ini hanya terbatas oleh pemilik usaha dan tidak mempekerjakan orang yang ahli dibidangnya sehingga pemantauan tersebut kurang efektif.
3) Kurangnya Pemanfaatan teknologi dalam menerapkan Sistem informasi akuntansi pada UMKM Cimahi, karena kurangnya pengetahuan para

pengguna *(user)* dalam menggunakan software yang ada sehingga membuat proses pembuatan laporan keuangan menjadi terhambat.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Internal.
2) Seberapa besar pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yangdituliskan (Sugiyono, 2013:282). Adapun tujuan penelitian tentang Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Internal dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan ini adalah untuk :

1) Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengendalian Internal.
2) Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Cimahi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat atau Kegunaan penelitian meupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab dengan akurat (Sugiono 2013:305).

1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kegunaan prakyis maka penelitian ini dapatberguna sebagai berikut:

> "Meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat dan terjadi serta menentukan metode untuk memecahkannya".

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan Cimahi pada khususnya dan seluruh UMKM umumnya.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) kegunaan akademis adalah untuk pengembangan keilmuan, dimana penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

> "Menerapkan kembali hsil penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut".

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut :

1) Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

   Diharapkan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang UMKM terutama mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan.

2) Bagi Peneliti

   Penulis dapat memperoleh pengalaman yang berkaitan tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan sehingga diperoleh gambaran kesesuaian fakta di lapangan dengan teori yang dipelajari, serta untuk menyelesaikan tugas akhir Skripsi sebagai syarat mendapat gelar Strata I (S-1).

3) Bagi Peneliti Lain

   Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan UMKM.